

PANDANGAN HUKUM DAN HAM JOKO WIDODO DAN PRABOWO SUBIANTO PADA DEBAT CAPRES PERTAMA 2019: SEBUAH ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH

Ilham Saiful Mubin

Departemen Linguistik, Universitas Indonesia
ilhamsaifulmubin@gmail.com

ABSTRACT

The debate between presidential and vice presidential candidates is a moment that the public has been waiting for to find out which candidate they will choose. From this debate, the public can determine their choice to become president and vice president. Therefore, in this research, the author chose the presidential and vice presidential candidate debates as the research object seen from the perspective of critical discourse analysis. This research is entitled "Joko Widodo and Prabowo Subianto's Legal and Human Rights Views on the 2019 First Presidential Candidate Debate: An Analysis of Norman Fairclough's Critical Discourse". This research aims to determine the linguistic aspects used by Joko Widodo and Prabowo Subianto in representing their views on law and human rights, forms of discourse practice, and the social or cultural traditions behind the emergence of this discourse. This research uses Norman Fairclough's analytical theory to look at ongoing social and cultural practices through text dimensions, discourse practice, and sociocultural practice to see the original reality that makes the discourse appear. To find out these three things, four stages were used, namely (1) using debate transcripts software Express Scribe; (2) linguistic analysis of the debate text; (3) discourse analysis of the debate text; (4) relating the social and cultural context to the debate text. Meanwhile, the method used in this research is a qualitative descriptive method, namely a method that aims to provide a systematic description of the data, characteristics, and relationships of the phenomena to be studied. Based on the results of the analysis, it was found that Jokowi views law and human rights as a unity. procedures that all have mechanisms so that when there are human rights violations they can be dealt with according to legal procedures. Meanwhile, Prabowo views law and human rights as regulations that can be controlled by the President as the highest head of government. These views are supported by their background and the work program presented. Apart from that, due to the social context built into the debate, they tried to attack each other with various case examples to defend their opinions and attract the hearts of the public.

Keywords: *presidential debate, law, human rights, critical discourse analysis, linguistic, socio-culture*

ABSTRAK

Debat calon presiden dan wakil presiden merupakan momen yang ditunggu oleh masyarakat untuk mengetahui calon yang akan dipilihnya. Dari debat itu, masyarakat bisa menentukan pilihan mereka untuk dijadikan sebagai presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis memilih debat capres dan cawapres sebagai objek penelitian yang dilihat dari sudut pandang analisis wacana kritis. Penelitian ini berjudul "Pandangan hukum dan HAM Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Debat Capres Pertama 2019: Sebuah Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek kebahasaan yang digunakan Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam merepresentasikan pandangan mereka terhadap hukum dan HAM, bentuk praktik wacana, dan praktik sosial atau budaya yang melatar belakangi munculnya wacana tersebut. Penelitian ini menggunakan teori analisis dari Norman Fairclough untuk melihat praktik sosial dan budaya yang sedang berlangsung melalui dimensi teks, discourse practice, dan sociocultural practice untuk melihat realitas aslinya yang menjadikan wacana itu muncul. Untuk mengetahui ketiga hal tersebut, digunakan empat tahapan, yakni (1) transkrip debat menggunakan software Express Scribe; (2) analisis kebahasaan dari teks debat; (3) analisis wacana dari teks debat; (4) mengaitkan konteks sosial dan budaya dengan teks debat tersebut. Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan memberikan deskripsi secara sistematis mengenai data, sifat-sifat, dan hubungan fenomenan-fenomena yang akan diteliti Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa Jokowi memandang hukum dan HAM sebagai kesatuan prosedur yang semuanya ada mekanismenya sehingga ketika ada pelanggaran HAM bisa ditindak sesuai prosedur hukum. Sementara itu, Prabowo memandang hukum dan HAM sebagai peraturan-peraturan yang bisa dikontrol oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Pandangan-pandangan itu didukung dengan latar belakang mereka dan program kerja yang disampaikan. Selain itu, konteks sosial yang dibangun dalam debat itu, mereka berusaha saling menyerang dengan berbagai contoh kasus demi mempertahankan pendapatnya dan bisa menarik hati masyarakat.

Kata kunci: *debat capres, hukum, HAM, analisis wacana kritis, aspek kebahasaan, sosial budaya*

PENDAHULUAN

Indonesia akan mengadakan kembali pemilihan umum pada tahun 2024. Isu-isu bermunculan terkait siapa sosok yang pantas dicalonkan menjadi kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Berkaitan dengan hal itu, calon presiden dan calon wakil presiden akan mensosialisasikan program mereka melalui kampanye

politik dengan harapan mampu menarik hati masyarakat. Pemilu 2019 yang lalu dilaksanakan serentak untuk memilih presiden dan dewan legislatif. Aroma persaingan pemilu ini sudah memanas pada pertengahan tahun itu, apalagi persaingan calon presiden. Seperti yang diketahui bahwa persaingan ketat dan panas waktu itu terjadi antara dua kubu, yakni Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta pasangan lainnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Kedua kubu ini bersaing secara politis untuk mengambil hati masyarakat Indonesia. Persaingan politik tersebut salah satunya dilaksanakan dalam bentuk debat kandidat capres dan cawapres, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Debat capres maupun cawapres ini tentunya merupakan bagian dari kampanye politik. Debat digunakan sebagai alat untuk merebut hati rakyat. Pemaparan visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan akan dinilai oleh masyarakat langsung. Dari debat tersebut, nantinya masyarakat akan melihat bagaimana atau seperti apa capres atau cawapres yang akan mereka dukung. Pelaksanaan debat capres dan cawapres pada Pemilu 2019 lalu secara rinci diselenggarakan lima kali, yakni pada tanggal 17 Januari, 17 Februari, 17 Maret, 30 Maret, dan 13 April 2019. Adapun tema yang dibahas adalah (1) hukum, HAM, korupsi, dan nepotisme; (2) energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan infrastruktur; (3) pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan serta sosial dan kebudayaan; (4) ideology, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan serta hubungan internasional; (5) ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, dan investasi serta perdagangan dan industri.

Pada data yang dihimpun oleh harian *detik.news* melalui Trans Media Sosial (TMS) terkait tema debat perdana Pilpres 2019 menyatakan bahwa isu-isu terkait hukum dan HAM menduduki peringkat kedua dan ketiga dari daftar tema yang paling diminati oleh masyarakat untuk dibahas dalam debat capres pertama. Masyarakat menilai bahwa topik-topik terkait RUU penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dana desa, aksi teror terhadap pejabat KPK, kasus pelanggaran HAM yang menyeret Novel Baswedan, kekecewaan terhadap penegakan HAM sangat menarik untuk dibahas sehingga masyarakat bisa mengetahui dan kemudian menilai bagaimana calon presidennya dalam menanggapi dan memaparkan kebijakan-kebijakan apa yang akan dicetuskan untuk subtopik-subtopik tersebut.

Maka dari itu, dari antusiasme masyarakat terhadap isu hukum dan HAM inilah membuat penulis ingin mengkaji isi dari tuturan-tuturan Joko Widodo dan Prabowo Subianto dalam menanggapi isu hukum dan HAM. Bagaimana arah dan kebijakan serta prinsip apa yang dimunculkan dalam tuturan-tuturan tersebut. Hal ini penting karena jika dikorelasikan dengan debat, para calon akan berusaha menguraikan tanggapan dan kebijakannya dengan baik sehingga masyarakat akan tertarik dan mendukungnya. Dalam penelitian ini, tuturan-tuturan tersebut selanjutnya akan dikaji menggunakan pendekatan CDA (*Critical Discourse Analysis*) untuk menemukan prinsip atau ideologi apa yang sebenarnya dibawa oleh masing-masing calon presiden.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut, (1) aspek kebahasaan apa saja yang digunakan oleh kedua calon presiden untuk merepresentasikan tema penegakan hukum dan HAM, (2) ideologi apa yang coba ditonjolkan oleh kedua calon presiden yang terlihat dari aspek kebahasaan yang dihasilkan dalam merepresentasikan tema penegakan hukum dan HAM. (3) situasi sosial, politik, dan budaya apa yang melatarbelakangi aspek kebahasaan yang digunakan untuk merepresentasikan tema penegakan hukum dan HAM?

Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baik dalam bidang akademik maupun sosial. Dalam bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas kajian-kajian mengenai analisis wacana kritis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memicu penelitian yang sejenis dengan kasus yang ada dalam masyarakat. Sementara itu, secara sosial, mudah-mudahan dengan penelitian ini sedikit membuka pengetahuan pembaca terlebih masyarakat mengenai sosok pemimpin yang telah dipilihnya dalam pemilu 2019 yang lalu.

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah cara dalam penelitian untuk memperoleh “pengetahuan” dan “pemahaman” dari objek yang diteliti. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tersebut, penulis melakukan empat tahap dalam penelitian ini, yakni (1) transkrip debat menggunakan *software Express Scribe*; (2) analisis kebahasaan dari teks debat; (3) analisis wacana dari teks debat; (4) mengaitkan konteks sosial dan budaya dengan teks debat tersebut. Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan memberikan deskripsi secara sistematis mengenai data, sifat-sifat, dan hubungan fenomenan-fenomena yang akan diteliti (Djajasudarma, 2006:20019).

Selanjutnya, pada analisis ini, penulis menggunakan teori analisis wacana dari Norman Fairclough (1995, 1998, dan 2000). Berdasarkan pendekatan Fairclough, analisis penelitian ini meliputi tiga tahap,

yakni (1) analisis teks, yaitu penjelasan wacana berdasarkan aspek kebahasaannya; (2) analisis wacana, yaitu menginterpretasi hubungan antara proses produksi wacana dan konsumsi teks; (3) analisis sosio-budaya, yaitu penjelasan mengenai hubungan antara wacana dengan proses sosial dan budaya yang melatarbelakangi munculnya wacana.

Pada analisis teks, Fairclough lebih menekankan pada aspek kebahasaan dari teks tersebut. Analisis ini meliputi analisis kosakata, semantik, sintaksis, dan bahkan lebih kecil seperti sistem morfologi serta sistem fonologinya. Pada analisis ini, Fairclough menyebut analisis ini sebagai analisis linguistik. Meskipun dilihat dari bentuk teksnya, Fairclough melihat bahwa ujaran (teks) yang ditampilkan merupakan bentuk representasi ideologis penutur atau penulisnya. Bagaimana suatu teks itu mengonstruksi sebuah realitas yang terhubung dengan pendengar atau pembacanya. Oleh karena itu, analisis terhadap aspek kebahasaan teks perlu dilakukan. (Fairclough, 1995:57 dan 2000:311)

Analisis yang kedua adalah analisis wacana (*discourse practice*). Pada analisis ini, interpretasi dilakukan terhadap bagaimana suatu teks itu diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi. Proses produksi teks lebih mengarah pada si pembuat teks. Tentu saja, dalam memproduksi sebuah ujaran (teks) pasti didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, lingkungan sosial, kondisi, keadaan, konteks, dan sebagainya yang dekat dengan si penutur atau pembuat teks tersebut. Sementara itu, untuk konsumsi teks, juga didasarkan pada pengalaman, pengetahuan konteks, lingkungan sosial, dan kondisi dari penerima teks tersebut.

Analisis ketiga adalah analisis yang berkaitan dengan sosial budaya. Ini mengacu pada konteks yang ada di luar teks. Kehadirannya berkaitan dengan konteks masyarakat, budaya, dan politik. Fairclough (1992a:67) menyatakan bahwa praktik sosial memiliki berbagai orientasi, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, ideologi, dan sebagainya, dan wacana merupakan gambaran dari semua masalah tersebut. Dengan demikian, analisis dimensi praktik sosial merujuk kepada usaha menjelaskan persoalan yang berkaitan orientasi seperti di atas, seperti berkaitan nilai, kepercayaan, ideologi, filosofi, budaya, dan lain-lain yang terdapat di dalam wacana (Idris, 2006:81).

Sementara itu, data dalam penelitian ini adalah tuturan-tuturan debat calon presiden (Joko Widodo dan Prabowo Subianto) yang sudah diunggah di halaman https://www.youtube.com/watch?v=hh6bAogz_OE dan kemudian ditranskrip menggunakan *software Expres Scribe*. Debat yang dijadikan data dalam penelitian ini adalah debat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019. Lebih khususnya adalah debat pertama segmen ketiga tentang tema hukum dan HAM. Pada debat segmen ketiga tersebut ada lima pernyataan serta tanggapan dari Joko Widodo dan ada empat pernyataan serta tanggapan dari Prabowo Subianto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(1). Analisis Teks

Pada tema tentang hukum dan HAM ini, ada tiga alat yang menandai representasi dari kedua calon presiden tersebut, yakni melalui pemilihan kosakata, pemilihan subjek dan objek dalam tataran kalimat, dan contoh kasus yang diberikan oleh masing-masing calon presiden tersebut.

a. Joko Widodo

Penggunaan diksi yang dominan dipilih oleh Joko Widodo berkaitan tentang tata kelola. Oleh karena itu, diksi yang dipilih adalah “prosedur”, “mekanisme”, dan “sederhana”. Korelasi antara ketiga kata tersebut adalah Joko Widodo ingin mengupayakan sebuah tata kelola hukum yang bekerja sesuai mekanisme yang benar dan mudah atau sederhana. Sementara itu, dalam tataran sintaksis, subjek yang sering dituturkan adalah prosedur dan penegakan hukum. Kemudian, yang menjadi objeknya adalah masyarakat.

Korelasinya adalah bahwa prosedur dan penegakan hukum akan melindungi masyarakat. Berikut tuturan yang disampaikan oleh Joko Widodo.

(1) Penegakan hukum itu melindungi masyarakat

Sementara itu, “mekanisme hukum” menjadi salah satu contoh kasus yang disampaikan oleh Joko Widodo. Dia memberikan kasus bahwa jika ada yang tidak baik di dalam pemerintah atau pejabatnya, semua orang berhak melaporkannya ke penegak hukum supaya bisa diproses berdasarkan mekanisme hukum”. Berikut contoh tuturan yang disampaikan.

(2) Kalau memang ada persekusi, gampang sekali, laporkan, saya kan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.

b. Prabowo Subianto

Penggunaan diksi yang dominan dipilih oleh Prabowo adalah “presiden”. Dalam hal ini, menurutnya, presiden mempunyai peranan penting di dalam hukum. Penggunaan diksi-diksi yang lain, seperti “pemerintah” dan “bertanggung jawab” juga menguatkan bahwa presiden adalah pemerintah yang bertanggung jawab. Dalam tuturan yang dipilih oleh Prabowo, kata “tanggung jawab” berkorelasi dengan masyarakat. Jadi, seorang presiden mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat. Sementara itu, dalam tataran sintaksis, subjek yang sering dipakai dalam tuturan Prabowo adalah “saya” yang berdasarkan konteks tuturannya mengibaratkan sebagai seorang presiden. Selanjutnya, objek yang cenderung dituturkan adalah “aparatus”. Berikut contoh kalimat yang dituturkan oleh Prabowo.

- (3) saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum
- (4) saya akan instruksikan,
- (5) saya akan tegaskan,

Pada contoh kalimat itu, yang menjadi objeknya adalah “aparatus”. Oleh karena itu, terlihat bahwa Prabowo, jika menjadi seorang presiden, akan berupaya keras untuk mendidik pejabatnya. Akan tetapi, untuk hal apa? Pada tuturan berikutnya, Prabowo menyampaikan bahwa itu semua untuk menjamin keselamatan semua rakyatnya. Seperti tuturan di bawah ini yang disampaikan oleh Prabowo.

- (6) bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apa pun, agama apa pun, etnis apa pun.

(2). Analisis Wacana

a. Joko Widodo

Joko Widodo dulunya sebagai pengusaha mebel yang melanjutkan kiprahnya di bidang politik pertamanya dengan menjadi Wali Kota Solo. Fokus pada pemerintahannya waktu itu adalah membangun sarana dan prasarana serta tata kelola pemerintah yang baik. (*detik.news*). Selain itu, ketika menjadi gubernur Jakarta, program yang dilaksanakan Jokowi juga seputar perbaikan sistem, misalnya pengembangan sistem angkutan massal, pengembangan sistem polder, dan perubahan beberapa sistem tata kelola lingkungan. Sementara itu, pada program pemerintahannya tahun 2014-2019, salah satu program unggulannya adalah membuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi. Tidak jauh berbeda dengan program yang sebelumnya, pada periode ini, dari kesembilan visi yang diajukan oleh Joko Widodo, beberapa di antaranya adalah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya serta pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. (*detik.news*) Dari uraian tersebut bisa terlihat bahwa sistem penegakan hukum dan tata kelola pemerintah menjadi beberapa hal yang menjadi prioritas Joko Widodo lima tahun mendatang jika terpilih lagi menjadi presiden.

b. Prabowo Subianto

Prabowo Subianto merupakan pensiunan TNI. Dia bekerja di TNI selama 24 tahun sejak 1998-1998. Jabatan tertinggi yang pernah dipegang olehnya adalah panglima kostrad. Selama menjadi TNI, dia pernah melakukan pembebasan beberapa sandera dan mendirikan datesemen 81 antiteror (*CNN News*). Dari hal ini bisa terlihat jiwa nasionalisme sudah terbentuk dalam membela negara. Sementara itu, pada pemilu 2019 ini, Prabowo mengusung beberapa visi dan misi tentang hukum, politik, dan hankam. Dalam visi misinya tersebut disebutkan bahwa negara hadir untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, supremasi hukum, dan penjaminan beberapa hal terkait politik, hukum, dan hankam. Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo menginginkan kehadiran negara sebagai kekuasaan tertinggi dalam penegakan hukum dan HAM.

(3). Analisis Sosio Budaya

Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. (KBBi Daring, Kemdikbud) Sementara itu, menurut Tarigan (1979) debat adalah saling adu argumentasi antar pribadi atau antarkelompok manusia dengan tujuan kemenangan satu pihak. Sesuai dengan pengertian debat tersebut, tujuan debat adalah untuk mempertahankan pendapat masing-masing dan memenangkan adu pendapat itu. Sementara itu, menurut

Pasal 23 ayat 1 PKPU Nomor 23 tahun 2018 menyebutkan bahwa debat calon presiden dan debat calon wakil presiden merupakan salah satu dari sembilan metode yang disediakan oleh KPU untuk berkampanye. Dalam proses kampanye inilah, persaingan ketat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan tersebut antara Joko Widodo dan Prabowo berusaha untuk memenangkan debat dengan mempertahankan pendapatnya.

Pada debat capres tema hukum dan HAM ini Prabowo menilai bahwa aparat dalam pemerintahan Jokowi tidak adil. Dia mencontohkan kasus di Jawa Timur bahwa kepala daerah yang memilih pasangan calon 01 akan ditahan dan ditangkap. Hal ini semakin menegaskan bahwa ada pelanggaran HAM karena masyarakat tidak diberikan keleluasaan berpendapat. Jika dikorelasikan dengan pendapat Prabowo, ini menjadi masalah serius dan presiden dalam hal ini harus bertindak tegas dalam hukum tersebut.

Untuk membela diri, Joko Widodo mempersilakan kepada semua saja untuk melaporkan ke penegak hukum jika memang ada bukti. Jokowi lebih menitikberatkan pada mekanisme hukum yang harus dijalankan. Tidak hanya itu, dalam kesempatan debat tersebut, untuk kembali menyerang Prabowo, Joko Widodo mencotohkan kasus yang terjadi pada Ratna Sarumpaet yang diberitakan dianiaya oleh kelompok tertentu sehingga Prabowo membuat konfrensi pers, tetapi nyatanya kasus tersebut adalah tidak benar, hanya dibuat-buat. Maka dari itu, Joko Widodo lebih menekankan bahwa dalam mengatur pemerintahan harus tenang tidak boleh *grasak-grusuk* “terburu-buru”. Joko Widodo kembali menegaskan bahwa semuanya dipersilakan dilaporkan jika ada buktinya karena mekanisme hukum sudah sangat mudah. Berdasarkan uraian di atas, wacana yang dimunculkan oleh kedua pasang calon presiden tersebut, yakni sama-sama berusaha untuk mempertahankan pendapat demi memenangkan debat tersebut. Serangan-serangan yang dituduhkan kemudian dibantah dan menyerang kembali dengan memberikan contoh kasus yang pernah dialami oleh masing-masing tokoh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, pandangan mengenai hukum dan HAM antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto berbeda. Joko Widodo lebih melihat bahwa semuanya ada prosedur dan mekanisme dalam hukum dan HAM, sementara Prabowo Subianto lebih melihat bahwa hukum dan HAM bisa dikendalikan oleh Presiden karena Presiden mempunyai supremasi hukum tertinggi. Pandangan-pandangan tersebut didukung dengan latar belakang keduanya dan program-program kerja yang ditawarkan. Program kerja yang ditawarkan oleh Joko Widodo, yakni membangun tata kelola pemerintah yang bersih dan hal ini berkaitan dengan bagaimana sistem, prosedur, dan mekanisme yang berjalan. Lain halnya dengan Prabowo, program kerja yang ditawarkan adalah negara berhak menjamin keadilan dalam bidang hukum dan HAM. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Prabowo bahwa negara dan presiden bisa hadir dalam menangani masalah kerakyatan. Selain itu, konteks sosial yang dibangun dalam debat capres ini adalah keduanya saling menyerang dengan berbagai contoh kasus demi mempertahankan pandangan dan pendapatnya. Hal ini dilakukan sebagai media kampanye untuk menarik hati masyarakat. Kesimpulan tersebut memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa setiap komunikasi yang disampaikan oleh seseorang memiliki arti dan maksud tertentu yang berkaitan dengan konteks teks, wacana, dan sosio-budaya. Meskipun demikian, penelitian ini hanya menggunakan satu teks sehingga tidak ada perbandingan dengan teks lain yang bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih tentang tuturan yang diproduksi oleh Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada debat capres itu. Oleh karena itu, penelitian serupa dengan membandingkan dengan teks lain diperlukan sehingga hasil penelitiannya lebih dalam dan terperinci.

REFERENSI

- Djajasudarma, T. Fatimah. 2006. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Eresco
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis*. Cambridge: Polity Press.
- _____. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- _____. 1998. “Political Discourse in The Media: An Analytical Framework”, dalam Allan Bell and Peter Garret (editor). *Approaches to Media*, hlm. 142–162. Massachusetts: Blackwell Publisher Inc.
- _____. 2000. “Critical Analysis of Media Discourse”, dalam Paul Marris and Sue Thornham (editor). *Media Studies a Reader*, hlm. 308–328. Washington New York University Press.
- Kemdikbud. 2016. *KBBI Daring*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya 21

- Lestari, Sri. 2014. *Profil Capres: Joko Widodo*.
https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2014/06/140626_lapsus_pilpres_profil_jokowi.
- Matanasi, Petrik. 2017. *Karier Militer Prabowo: Melesat Lalu Terpeleset*. <https://tirto.id/karier-militer-prabowo-melesat-lalu-terpeleset-ctGX>
- Profil Prabowo Subianto. 2019. *Prabowo Subianto*. <https://www.cnnindonesia.com/pemilu2019/profil-prabowo-sandiaga>
- Ramdani, Jabbar. 2018. *Melihat lagi Biografi Jokowi, Capres Koppig 2019*. <https://news.detik.com/berita/d-4160025/melihat-lagi-biografi-jokowi-capres-koppig-2019>
- Tarigan, Henry Guntur. 1979. *Berbicara*. Bandung : Angkasa